

































NU. Namun, berkaitan dengan empat madzab, Perti hanya menganut satu madzab, yakni madzab Syafi'i.

Corak kepemimpinan Partai, seperti halnya di NU, bersifat paternalistik, yang menempatkan Ulama pada posisi yang tinggi. Pemahaman keagamaan yang cenderung bersifat taqlid menjadikan sifat paternalistik kepemimpinannya menonjol. Massa pendukung Perti berpusat di madrasah-madrasah yang bercorak syafi'iyah.

Sementara itu, orientasi politik Perti, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, lebih bersifat akomodatif, terutama hal-hal yang tidak berhubungan dengan hukum Syar'i dalam Islam. Walaupun Perti merupakan unsur terkecil pendukung PPP, namun merupakan unsur yang cukup setia. Bila dua unsur lainnya, NU dan SI, masing-masing sudah menyatakan tidak memiliki aspirasi politik dengan PPP, namun Perti, seperti juga MI, masih menyatakan menyalurkan aspirasinya kepada PPP.

Bila dilihat karakteristik dasar PPP yang terurai dari keempat unsur fusinya, dapat diperkirakan sejauh mana kemampuan masing-masing unsur untuk tetap mempertahankan fusi. Perbedaan klasik antara NU dan MI merupakan sumber konflik laten, walaupun perkembangan di luar partai juga merupakan kendala tuntasnya fusi. Sementara itu satu-satunya pengikat masing-masing unsur dalam fusi adalah motivasi ke-Islaman.

## **Perkembangan PPP**

### **PPP sebagai Partai Tunggal Islam**

Nampaknya, keharusan fusi menjadi satu partai bagi empat partai Islam ini merupakan suatu keterpaksaan yang sebenarnya tidak diinginkan. PPP yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Islam, serta berlambang tanda gambar Ka'bah ini langsung dihadang oleh masalah-masalah dalaman yang berat. Dalam perjalanannya, PPP nampaknya padat dengan konflik dalaman yang dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Sumber konflik di antaranya adalah perselisihan antar unsur dalam penyusunan daftar calon anggota DPR, pertentangan tentang jumlah calon masing-masing unsur, apakah mengikuti status quo pada pemilu-pemilu sebelumnya atautkah perlu perubahan, perebutan posisi pimpinan komisi di DPR. Konflik demikian lebih diperparah oleh usaha penyelesaian konflik yang tidak rasional, misalnya pencoretan beberapa nama calon anggota DPR yang berbobot, dan tidak demokratisnya proses penentuan kepemimpinan partai (Panji Masyarakat 1983). Pemimpin PPP, H. Mintardja dan J. Naro, keduanya dari unsur Parmusi, tidak lahir melalui Mukhtar Partai. Mereka muncul melalui jalur "saling pengertian" elite politik dari keempat unsur dalam partai, yang kemudian mendapat restu dari "atas".

Selari dengan semakin pelbagai pentingnya kepentingan di kalangan elite partai, pemerintah menerapkan strategi politik massa mengambang yang pada dasarnya semakin mengasingkan partai politik dari massa di pedesaan. Tanda gambar partai



politik hanya sampai di tingkat kecamatan, dengan demikian akar-akar yang mempertautkan partai dengan massa, yang 80 peratus lebih berada di kawasan pedesaan, menjadi terputus. Partai tidak mampu menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi pada tingkat bawah, aktifitas partai memusat di sekitar fungsi-fungsi parlemen.

Konflik internal yang tidak pernah dapat terselesaikan secara tuntas merupakan sumber utama semakin melemahnya partai Islam ini. Harapan akan terwujudnya solidariti Islam yang dimotori oleh empat unsur yang melakukan fusi tidak pernah terwujud, bahkan masing-masing unsur berusaha memperkuat posisinya untuk menindas atau menghadapi unsur yang lain. Dari sini nampak bahwa fusi terwujud dalam tingkah laku politik para elite politik.

Sudah diduga oleh para pengamat bahwa PPP, partai tunggal Islam ini, tidak akan mengalami perkembangan yang berarti pada pilihan-pemilihan umum pasca pemilihan umum 1971. Sekalipun pada pemilihan umum 1977 PPP berhasil menambah 5 kursi dari 94 menjadi 99, tetapi pada pemilihan umum 1982 kembali pada posisi semula, yaitu 94 kursi. Hasil pilihan-pemilihan umum tersebut jelas tidak memberikan peluang bagi partai Islam ini untuk mengembangkan diri. Bahkan kepercayaan pemerintah menyertakan partai ini dalam kabinet pun hilang. Dengan kemenangan mutlak Golkar, kekuatan politik yang disokong oleh kerajaan, partai Islam PPP ini seakan-akan menjadi tidak berarti dan tidak diperhitungkan.

Dalam Sidang Umum MPR 1977, Partai Islam PPP berusaha berjuang untuk menunjukkan dan mempertahankan karakteristiknya. PPP berusaha mencegah dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN dan ditetapkannya P-4 sebagai ketetapan MPR, yang dipersiapkan oleh pemerintah. Dalam suasana hangat perdebatan dalam MPR, Partai Islam ini terpaksa memilih jalan "Walk Out" (WO) terhadap materi perdebatan yang nampaknya memang ingin dipaksakan. Di sini nampak ketidakberdayaan Partai Islam ini dalam parlemen, karena pada akhirnya aliran kepercayaan tetap masuk dalam GBHN dan P-4 menjadi salah satu ketetapan MPR. Kegagalan Partai Islam dalam mempertahankan pendiriannya, pada gilirannya justru merupakan sumber perdebatan dalaman yang semakin melemahkan partai.

Menghadapi pemilihan umum 1982, Partai Islam PPP tidak menampakkan kesiapan yang lebih mantap, walaupun mengalami peningkatan perolehan kursi pada pemilu 1977. Bahkan konflik intern lama kambuh kembali, yaitu perselisihan antara unsur NU dan unsur MI mengenai penyusunan jumlah dan nomor urut calon legislatif. Di bawah kepemimpinan H.J. Naro, unsur MI lebih berani melangkah untuk sekaligus menyudutkan unsur NU. Bahkan NU pernah mengancam memboikot pemilihan umum. Sementara kekuatan politik lainnya melakukan usaha konsolidasi, PPP, partai tunggal Islam justru dilanda konflik yang sedang menuju klimaksnya antara unsur NU dengan unsur MI (Abu Jihan 1984).



Dalam suasana retak di dalam seperti inilah partai tunggal Islam, PPP, menyongsong pemilihan umum 1982. Di tengah kehidupan partai yang “megap-megap” itu pulalah PPP memasuki gelanggang kempen. Terjadinya bentrok fisik ketika Golkar mengadakan kempen “akbar” banyak dipandang merupakan salah satu bukti betapa semaraknya suasana kempen. Bentrok fisik tersebut disebut sebagai peristiwa “Lapangan Banteng”. Menurut pemberitaan pers, sesuai dengan versi pihak keselamatan, punca kerusuhan tersebut adalah sekumpulan orang dari PPP. Diterjemahkan secara bebas lalu dikatakan bahwa kerusuhan itu bermotifkan agama. Sejauh mana tuduhan terhadap agama (Islam) itu dapat dipertanggungjawabkan, namun dari sini umat Islam “tercoreng” yang kesekian kalinya, dan kejadian ini pulalah yang dijadikan dalih untuk memutuskan hubungan agama dengan politik. Ideologi dibersihkan dari campur tangan agama (Rusli Karim 1982a).

Demikianlah, akhirnya, seperti diduga banyak pengamat, bahwa PPP tidak akan mengalami kemajuan, dan terbukti pada pemilihan umum tahun 1982 PPP kehilangan 5 kursinya kembali menjdai 94. Selama hampir 10 tahun, PPP, partai tunggal Islam, senantiasa diwarnai konflik, dan tidak mengalami perkembangan yang bererti.

### **PPP Melepaskan Azas Islam**

Pemira ketiga pada masa Orde Baru dilaksanakan 4 Mei 1982. PPP, partai tunggal Islam, memperoleh 27,78 peratus dengan 94 kerusi di DPR, sementara Golkar, kekuatan politik sokongan kerajaan, meraih 64,34 peratus suara dengan 246 kerusi di DPR (Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin 1988). Hasil pemilihan umum di atas melapangkan jalan bagi kerajaan untuk memaksakan ambisi politiknya, dan apapun yang dikehendaki akan terlaksana.

Kelanjutan ambisi politik pemerintah Orde Baru didengungkan kembali melalui pidato kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1982, tiga bulan setelah kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum. Dalam pidatonya itu Presiden menyatakan bahwa pemerintahan telah memberikan “lampu hijau” dan sekaligus mengeluarkan “uneg-uneg”-nya dalam rangka pembubaran partai Islam (Panji Masyarakat 1982a).

Dalam keadaan tidak berdaya, PPP, partai tunggal Islam dihadapkan kepada pilihan yang paling pahit. Nampaknya, demi kelangsungan partai, PPP segera menyatakan menerima seruan penghilangan azas ciri (Islam) dan menegaskan bahwa satu-satunya azas PPP adalah Pancasila. Nampaknya PPP menyadari betul bahwa, bagaimanapun, kehendak pemerintah tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Dengan demikian, sebenarnya, bahwa PPP, sebagai partai tunggal Islam, telah membubarkan diri.

Bagaimanapun, penerimaan PPP terhadap azas tunggal Pancasila tidak meredakan konflik. Bahkan dapat diperkirakan, isu azas tunggal ini justru menjadi sumber konflik baru antara mereka yang pro dan yang kontra, atau saling bersaing

untuk menampilkan diri sesuai dengan azas “baru” tersebut. Sampai pada Mukhtamar I PPP, Agustus 1984, konflik dalam tubuh PPP belum juga reda. Mukhtamar tersebut menghasilkan mengangkat kembali J. Naro sebagai pimpinan puncak PPP yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan unsur NU.

Sejak Mukhtamar yang tidak memuaskan tersebut, NU cenderung merenungkan kembali peranannya dalam partai selama ini, dan setelah mempertimbangkan bahwa politik J. Naro tidak mungkin di-“jinakkan”, maka melalui mesyuarat agung di Situbondo, akhir 1984, NU memproklamkan diri kembali ke khittah (garis perjuangan) 1926, yaitu kembali sebagai Jam’iyyah Islam dan sama sekali melepaskan dunia politik serta memutuskan sama sekali hubungannya dengan PPP (Rusli Karim 1982b). Keputusan mukhtamar NU tersebut disosialisasikan melalui fatwa Rois ‘Aam NU KH. Acmad Siddiq yang berisi :”warga NU tidak wajib mencoblos PPP, tidak haram mencoblos Golkar dan PDI”. Fatwa ini kemudian disebar-luaskan dalam “buku kuning”, NU dan Pemilu, yang disusun oleh A. Zundi Muhdlor dan diberi pengantar oleh H. Syaiful Mujab, wakil ketua PBNU. Selain berisi fatwa, buku setebal 50 halaman itu juga memuat kembali intisari keputusan mesyuarat agung tentang kembali ke “khittah 1926” berikut uraian mengenai “perlakuan PPP” yang dianggap tidak adil terhadap NU. Munculnya fatwa ini ternyata mempunyai dampak yang cukup jauh, dan tak lama kemudian berbagai pesantren, basis cultural NU, dan banyak para pimpinan NU membawa massanya menyatakan sikap meninggalkan PPP, dan berbondong-bondong pindah ke Golkar dan PDI (Syamsuddin Haris 1987).

Bersamaan dengan penyebaran sikap penggembosan NU menyusul hasil Mukhtamar NU di Situbondo akhir 1984, ketentuan mengenai penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai politik mengarah kepada keputusan final. Dalam proses selanjutnya, ketentuan mengenai hal tersebut, secara yuridis formal, dituangkan dalam bentuk undang-undang No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan demikian, maka eksistensi PPP sebagai partai tunggal Islam secara resmi telah diakhiri.

Sementara pihak memandang bahwa ketentuan asas tunggal pancasila tersebut bererti lenyapnya symbol-simbol Islam dalam politik berbangsa dan bernegara yang pada hakekatnya merupakan usaha eliminasi politik atau depolitisasi dari Islam. Namun Ahmad Syafi’i Maarif menegaskan bahwa apapun strategi deopolitisasi Islam atau de-Islamisasi politik tidak akan pernah berhasil (Panji Masyarakat 1985a). Sedangkan Nurholish Madjid memandang bahwa Islamisasi di Indonesia akan lebih cepat jika dilakukan melalui deislamisasi partai politik di satu pihak dan di pihak lain melalui depolitisasi organisasi-organisasi Islam (Arif Mudatsir 1984). Dijelaskan lebih lanjut bahwa strategi di atas dalam rangka mengembangkan inklusivisme Islam, agar kelompok atau golongan partaisan tertentu dapat terbebas dari hambatan psikologis dalam mengadopsi Islam secara tuntas (Panji Masyarakat 1985b). Pandangan varetif tentang hubungan Islam dengan politik (partai politik) tersebut mengantarkan PPP memasuki pemilihan umum 1987.

Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang sejak tahun 1985 secara resmi bukan partai Islam lagi, disertai problematika yang semakin kompleks, memasuki pemilihan umum 1987. Dan, seperti diperkirakan oleh banyak pengamat bahwa PPP akan mengalami kemunduran dan kemerosotan perolehan suara pada pemilihan umum tersebut. Terbukti, pada pemilihan raya 1987 suara PPP merosot tajam, hanya 15,25 peratus. Dari 94 kursi di DPR pada tahun 1982, merosot menjadi hanya memperoleh 61 kursi di DPR hasil pemira 1987.

Menjelang pemilihan umum 1992, yakni pada tanggal 28-31 Agustus 1989, PPP menyelenggarakan mesyuarat agung yang ke II setelah 17 tahun di pentas politik Orde Baru. Walaupun J. Naro tetap berusaha keras untuk menduduki jabatan ketua am untuk periode berikutnya, namun pada akhirnya Ismail Hasan Metareum, SH yang terpilih sebagai Ketua Umum yang baru menggantikan J. Naro.

Terpilihnya Ismail Hasan Metareum sebagai Ketua Umum PPP yang baru telah menimbulkan optimisme di kalangan elite PPP akan adanya peluang meningkatkan perolehan suara setidaknya sama dengan perolehan suara pada pemilihan umum 1982. Dengan terpilihnya Ismail Hasan Metareum, masyarakat NU yang pada pemilihan umum 1987 membelot ke Golkar dan PDI diharapkan kembali mendukung dan memilih PPP pada pemilihan umum 1992. Harapan ini tidak berlebihan mengingat walaupun Ismail Hasan Metareum berasal dari unsur MI tetapi memperoleh dukungan luas termasuk kelompok NU yang diwakili oleh Imam Sofwan (Syamsuddin Haris 1991).

Ketika hasil pemilihan umum 1992 selesai diumumkan dan ketiga OPP telah sepakat menerima, ternyata PPP tidak mengalami kenaikan yang berarti. Sementara di Jawa kursi PPP bertambah 7 kursi, tambahan satu kursi dari Jawa Barat, 3 kursi dari Jawa Tengah dan 3 kursi dari Jawa Timur. Tetapi berkurang 6 kursi di wilayah pemilihan Sumatera (Tri Sukses 1992).

### **PPP Kembali Menggunakan Azas Islam**

Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menyusul demonstrasi besar-besaran, terutama oleh mahasiswa, di seluruh kota di Indonesia menuntut perubahan. Peristiwa ini menandai awal transisi demokrasi yang kemudian dikenal dengan "reformasi". Partai politik yang pada masa Orde Baru berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pada masa reformasi lebih bebas yang memunculkan partai-partai yang berasaskan agama dan asas-asas lain, kecuali asas komunisme..

Faktor penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 memberikan kontribusi sangat penting bagi partai politik dalam menata dan mewarnai demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan amandemen UUD 1945 tersebut menjadi factor penentu yang

mengubah dan membentuk struktur kepartaian dan dinamika kehidupan politik yang berlangsung saat ini.

Munculnya peraturan tentang partai politik mendorong terbentuknya beragam partai politik, sama ada dari segi jumlah mahupun ideology politik. Masa setelah kejatuhan Soeharto ini terjadi pembebasan politik aliran, dengan sedikit penyimpangan, untuk tampil secara terbuka dalam panggung politik. Berbagai aliran politik yang pernah tampil pada masa awal kemerdekaan tampil kembali dalam panggung politik. Partai dengan jubah agama, etnis dan ideology nasionalis lahir kembali. Sedikit penyimpangan atau anomaly adalah munculnya partai yang tidak sepenuhnya mengekspresikan aliran secara telanjang, tetapi lebih bercorak pseudo aliran seperti yang terlihat pada PKB dan PAN. Kedua partai tersebut lahir dari rahim aliran, yaitu NU dan Muhammadiyah, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan simbol agama dan juga tidak sepenuhnya meninggalkannya.

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menjadikan kehidupan partai politik pada era reformasi dipenuhi oleh partai yang lahir dengan mengambil inspirasi kepartaian pada masa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, partai yang dikonstruksi masa Orde Baru, dan partai-partai baru yang tidak memiliki preseden kesejarahan sebelumnya. Hampir semua aliran ideology dan partai yang pernah hidup pada masa sebelumnya, kecuali komunis, hadir kembali dan bersaing dengan partai-partai yang memang sama sekali baru.

Partai Persatuan Pembangunan yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973, bersama Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lahir sebagai akibat politik fusi yang ditempuh oleh Orde Baru. PPP merupakan fusi dari partai-partai yang berada pada kelompok spiritual-material, yaitu partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, yang meliputi NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sejak partai-partai tersebut melebur dalam PPP, konflik internal antar unsure pembentuk partai terus menyelimuti partai, yang berakibat, salah satunya, keluarnya NU dari PPP pada tahun 1985.

Pada awalnya PPP berideologi Islam moderat. Partai ini sering disebut sebagai “rumah besar umat Islam”, karena berbagai unsure Islam politik terfasilitasi di PPP. Ketika zaman Orde Baru, PPP menjadi articulator perjuangan Islam politik dan tidak jarang mengambil sikap oposisional. PPP kritis terhadap isu-isu yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti misalnya masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, Undang-Undang Perkawinan, pelembagaan P4, dan azas tunggal Pancasila (Azis, 2006). PPP sebagai partai Islam sempat mengalami dilemma ketika Orde Baru memaksakan azas tunggal Pancasila bagi semua kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan. PPP akhirnya mengganti azas Islam dengan azas Pancasila dan lambang Ka’bah diganti dengan lambang Bintang segi lima.

Pada era reformasi, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka’bah, tetapi juga sekaligus kehilangan monopolinya sebagai satu-satunya partai Islam. Unsur-unsur yang dulu membentuk PPP kemudian membentuk partai tersendiri (Amir 2003). Namun demikian, kemudian konflik kembali melanda PPP dengan lahirnya PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai

Bintang Reformasi (PBR). Dari sisi perjuangan ideology, pada amandemen UUD 1945 (1999-2002) PPP berusaha memasukkan ideology Islam sekaligus menolak aliran kepercayaan dan komunisme melalui perubahan pasal 29 (Mandan 2009, Subekti 2008).

### **FAKTOR PENGARUH PEROLEHAN SUARA PPP PADA PEMILIHAN UMUM 1997, 1999, 2004 DAN 2009 DI KELURAHAN AIR TIRIS**

Menyimak analisis perkembangan perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 di atas dapat dilihat faktor pengaruh perolehan suara PPP pada masing-masing pemilihan umum, sama ada PPP mengalami kemenangan maupun PPP mengalami kekalahan. Dari kondisi tersebut, kemudian, dapat dilihat faktor pengaruh penurunan perolehan suara PPP. PPP di desa/kelurahan Air Tiris mengalami perkembangan perolehan suara yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada pemilihan umum 1997 dan 1999, PPP sebagai partai Islam dengan lambang gambar Bintang kemudian Ka'bah mampu meraih suara masing-masing 34,00 peratus dan 35,11 peratus. Pada pemilihan umum 2004 PPP di desa/kelurahan Air Tiris menurun drastis, hanya meraih 11,6 peratus suara, dan mengalami penurunan lebih tragis dengan hanya meraih suara 4,7 peratus.

Melalui pengamatan yang cermat didapatkan bahwa kegiatan keagamaan masyarakat desa/kelurahan Air Tiris cukup intensif dengan fasilitas simbol keagamaan, misalnya : Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Madrasah dan sebagainya, memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa/kelurahan Air Tiris dapat dikategorikan sebagai masyarakat santri. Dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilihan umum, masyarakat desa/kelurahan Air Tiris lebih mengidentifikasikan diri pada partai-partai Islam. Sosialisasi politik melalui lembaga-lembaga keagamaan pada awalnya mampu menjaga identifikasi tersebut dari pemilihan umum ke pemilihan umum. Seperti masyarakat desa umumnya, masyarakat desa terbagi menjadi sebagian kecil para pemuka masyarakat yang biasa disebut kelompok elite berhadapan dengan sebagian besar masyarakat yang biasa disebut kelompok massa, dengan kelompok elite didominasi oleh para tokoh informal. Melalui pola hubungan yang sedikit banyak bersifat patron client, perubahan-perubahan kelompok elite, baik secara individu maupun secara kelompok, akan berpengaruh pada perubahan masyarakat pada umumnya, termasuk kaitannya dengan pilihan dalam pemilihan umum.

Dalam kasus pemilihan umum 1997, masyarakat desa/kelurahan Air Tiris yang telah terbentuk menjadi masyarakat santri dan telah mengenal dan menjatuhkan pilihan pada partai-partai Islam sejak pemilihan umums 1955, serta didukung oleh kekompakan kelompok elite yang didominasi para tokoh informal, PPP menjadi pemenang kedua setelah Golkar, dengan meraih suara yang cukup meyakinkan sebesar 34,00%. Pada pemilihan umum 1999 telah terjadi perubahan system kepartaian dimana muncul 48 partai politik peserta pemilihan umum. Muncul partai-partai politik Islam baru, seperti PAN, PK, PKB, PBB, yang menjadikan PPP bukan lagi satu-satunya partai Islam. Paradigma lama, di mana





seluruh pegawai negeri, tentara, polisi dan para pejabat wajib mendukung dan memilih Golkar, pada pemilihan umum 1999 tidak berlaku lagi, bahkan seluruh pegawai negeri, tentara, dan polisi tidak boleh menjadi anggota partai politik, sementara para pejabat bebas bergabung atau tidak dengan partai politik. Para tokohpun kemudian tersebar bergabung dengan partai-partai baru, terutama partai-partai Islam. Perubahan system yang terjadi menjelang pemilihan umum 1999 ini telah menjadikan para tokoh masyarakat desa/kelurahan Air Tiris mengalami anomaly, mengalami perubahan sikap yang menjadikan partai Golkar mengalami kemerosotan drastic dan munculnya pemenang partai Islam baru yaitu PAN. Sementara suara PPP tetap terjaga bahkan mengalami peningkatan walau sangat sedikit. Perubahan sikap kelompok elite seperti ini ternyata diikuti oleh sebagian besar masyarakat desa/kelurahan Air Tiris dan membuyarkan identifikasi masyarakat terhadap partai Golkar sebagai partai pengayom dan pembangun yang telah puluhan tahun terbentuk. Sementara partai politik Islam baru, PAN, berjaya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sesungguhnya sebutan masyarakat santri pada masyarakat desa/kelurahan Air Tiris pada dasarnya menjadi lebih nyata. Kondisi menjelang pemilihan umum 2004 mengalami perubahan, dengan berbagai alasan para fungsionaris PPP desa/kelurahan Air Tiris mengundurkan diri dari PPP dan bergabung dengan PBR (Partai Bintang Reformasi), partai pecahan dari PPP. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya masyarakat, khususnya pada kelompok elite, yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Pada pemilihan umum 2004, partai Islam baru PBR memperoleh kemenangan dengan 41,00 peratus suara, sementara PPP mengalami penurunan drastic hanya meraih 11,6 peratus suara, partai Golkar mengalami penurunan lagi dengan hanya meraih 10,9 peratus suara. Partai-partai Islam baru yang lain, PBB dan PKS mengalami kenaikan yang cukup berarti. Partai pemenang pemilihan umum 1999 mengalami kemerosotan tajam, hanya meraih 9,7 peratus, jauh di bawah perolehan suara pada pemilihan umum 1999, 43,84 peratus suara. Pemilihan umum 2009 di desa/kelurahan Air Tiris menunjukkan fenomena yang mengejutkan . Kalau pemilihan umum 1999 dan 2004 dimenangi oleh partai-partai Islam, sebaliknya pada pemilihan umum 2009 lebih didominasi partai-partai nasionalis. Partai-partai nasionalis, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP masing-masing memperoleh 43,7 peratus, 8,36 peratus dan 3,7 peratus yang berarti perolehan suara lebih dari 50 peratus. Sementara-partai-partai Islam secara keseluruhan memperoleh kurang dari 50 peratus, dengan PBR dan PAN memperoleh suara terbesar, masing-masing 17,3 peratus dan 16,7 peratus. Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan system di mana masyarakat pemilih dapat memilih langsung calon legislative yang terpampang gambarnya pada kertas suara. Di samping itu, calon legislative yang terjun langsung dalam kampanye atau sosialisasi diri tidak sulit untuk menyerahkan bantuan langsung, terutama saat-saat menjelang dan pada masa kampanye, baik berupa dana maupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan, terutama pembangunan masjid dan mushalla. Calon legislative yang paling mampu melaksanakan hal itu memperoleh sambutan masyarakat yang sepadan. Dan pada pemilihan umum 2009 ini partai Golkar dan partai Demokrat yang paling banyak secara cerdas menggunakan kesempatan.

## KESIMPULAN



Perolehan suara PPP 34,00 peratus dan 35,11 peratus, sebagai pemenang kedua pada pemilihan umum 1997 dan 1999 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam telah mengakar sangat kuat. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Sampai pada pemilihan umum 1999, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris masih memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai Islam PPP.

Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP berhasil merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Dalam kempen dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam yang menyalurkan aspirasi ummat Islam, sudah sepantasnya masyarakat Islam mendukung dan menjatuhkan pilihannya.

Perolehan suara PPP 11,6 peratus, mengalami penurunan cukup tajam, pada pemilihan umum 2004 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam telah mengakar sangat kuat. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Namun suara pemilihan umum tidak lagi mutlak untuk PPP, namun untuk partai-partai Islam lainnya, seperti PAN, PBB dan PKS.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Namun pada pemilihan umum 2004, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris tidak lagi memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai Islam PPP. Para elite mulai tersebar, tidak lagi hanya monopoli PPP, melainkan juga untuk PBR, PAN, PKS dan PBB.





Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP tidak lagi sepenuhnya mampu merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Dalam kempen tidak lagi boleh dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam. Masyarakat ummat Islam, mendukung dan menjatuhkan pilihannya menyebar ke banyak partai politik Islam..

Perolehan suara PPP 4,7 peratus, mengalami penurunan lebih tajam lagi, pada pemilihan umum 2009 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam yang telah mengakar sangat kuat mulai memudar. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Namun suara pemilihan umum tidak lagi banyak dipengaruhi oleh ideology agama melainkan lebih pada partai yang lebih kongkrit memberikan kemanfaatan. Dalam hal ini partai Golkar dan partai Demokrat lebih mampu leluasa dalam memberikan kemanfaatan. Golkar dan PD memenangkan pemilihan umum 2009.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Pada pemilihan umum 2009, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris masih memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai politik. PPP ternyata telah ditinggalkan. Pilihan lebih didasarkan pada kemampuan partai dalam memberikan kemanfaatan nyata, partai Golkar dan partai Demokrat..

Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP telah gagal merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Di samping itu, dalam kempen tidak lagi boleh dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam. Masyarakat ummat Islam, mendukung dan menjatuhkan pilihannya menyebar ke banyak partai politik Islam dan bahkan memenangkan partai Golkar..

Dari kasus empat pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 di atas menunjukkan adanya kecenderungan, bahwa masyarakat Islam, masyarakat santri tidak selalu menjatuhkan pilihan atau mengidentifikasikan diri pada partai Islam. Berkaitan dengan partai-partai politik peserta pemilihan umum, masyarakat Islam, masyarakat santri tidak selalu menjatuhkan pilihan atau mengidentifikasikan diri pada partai Islam, khususnya PPP. Di samping, itu sikap dan arah gerak warga masyarakat desa, termasuk sikap menentukan pilihan pada pemilihan umum, sangat dipengaruhi oleh para pemimpin mereka, dalam kerangka pola hubungan



yang paternalistic. Kekompakan para pemuka masyarakat membawa kekompakan massa, sebaliknya terpecahnya para pemuka masyarakat akan mengakibatkan terpecahnya massa. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, pilihan masyarakat terhadap partai tertentu lebih ditentukan oleh kemana para pemuka masyarakat tersebut menjatuhkan pilihan. Dari sini ditemukan dua factor utama yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997,1999, 2004 dan 2009 di desa/kelurahan Air Tiris, yaitu : pertama, melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum, dan kedua, dominasi elit politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jihan (ed.). 1984. *PPP, NU, dan MI Gejolak Wadah Politik Islam*. Jakarta. Integrita Press.
- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (pnyt.). 1988. *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali Press dan AIPI.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Suharto*. Jakarta. LP3ES.
- Azis, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Bert F. Hoselitz. 1988. *Panduan Dasar Ilmu Ilmu Sosial*. Terj. Jakarta: Rajawali Press.
- Chairul Anam. 1985. *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu.
- Deliar Noer. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Donald K. Emerson. 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca: Cornell University Press.



- Fachry Ali dan Iqbal A. Saimima. 1981. Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan. *Prisma*. No. 12.
- K.E. Ward. 1970. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Mandan, Arief Mudatsir. 2009. Krisis Ideologi : Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP. Jakarta. Pustaka Indonesia Satu.
- M. Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Rusli Karim. 1992. *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*. Yogyakarta: PT. Media Widya Mandala.
- Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panji Masyarakat. 1985.
- R. William Liddle. 1992. Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- R. Williams Liddle, tanpa tahun. Politics and Culture in Indonesia, p.20, The Ohio State University.
- S. Sapto Ajie (pnyt.). 1985. *UU RI No.1 Tahun 1985 tentang Pemilu*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Siradjudin Abas. 1983. *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Syamsudin Haris. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti, Valina Singka. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi. Jakarta. Rajawali Press.
- Taufik Abdullah. 1981. Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Tri Sukses. 1992. 10 Jun.

